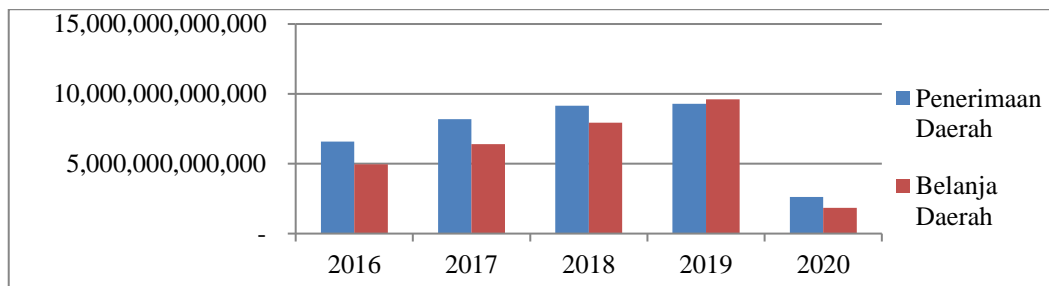


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Meningkatnya penerimaan daerah memberi pengaruh positif terhadap belanja daerah karena, belanja daerah sangat bergantung dengan penerimaan daerah. Belanja daerah harus terus meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memicu terbukanya peluang penerimaan daerah baik dari sisi pajak ataupun retribusi. Gambaran penerimaan dan belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar 1.1.1.

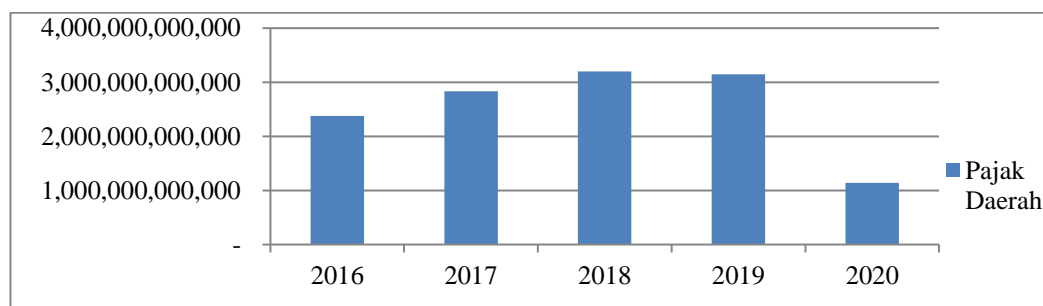


Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Data diolah, 2021)

Gambar 1.1.1 Penerimaan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 1.1.1, penerimaan dan belanja daerah di Sumatera Selatan meningkat sejak tahun 2016 hingga 2019, peningkatan belanja daerah ini didominasi oleh belanja modal. Ditahun 2019 pembiayaan daerah dibutuhkan untuk menutupi belanja daerah sebesar Rp337.332.441.392, karena penerimaan daerah sebesar Rp9.280.742.072.448 lebih rendah dibandingkan belanja daerah yaitu Rp9.618.074.513.840. Lalu ditahun 2020, penerimaan dan belanja daerah yang didominasi oleh belanja barang dan jasa justru menurun karena pandemi covid-19. Dilansir dari (Tempo.co, 2020) “Belanja daerah dimasa pandemi covid-19 cenderung menurun dan hanya sebesar 16%”. Terjadinya penurunan belanja daerah ditahun 2020 dipengaruhi oleh penerimaan daerah yang turut menurun menjadi Rp2.630.380.697.412 karena pandemi covid-19. Penerimaan daerah yang cenderung menurun terdiri atas; pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran.

Pajak daerah adalah penyokong terbesar penerimaan daerah, sehingga penerimaan daerah sangat bergantung dengan pajak daerah. Kondisi disaat pajak daerah meningkat tentu menyebabkan penerimaan daerah turut meningkat. Berikut grafik pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 hingga 2020.



Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Data diolah, 2021)

Gambar 1.1.2

Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Selatan tahun 2016 -2020

Berdasarkan gambar 1.1.2, pajak daerah Sumatera Selatan meningkat pada tahun 2016 hingga 2018 dan cenderung menurun pada tahun 2019 hingga 2020, dengan Pajak Permukaan Air sebagai penerimaan paling rendah sejak tahun 2016 hingga 2019 dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi penerimaan terendah ditahun 2020 (Gatra.com, 2020). Dilansir dari (BritaBrita.com, 2020), “Kepala Bapenda Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan ditahun 2020 menurun menjadi 3-4 miliar perhari lantaran pandemi covid-19”. Selain itu, berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, menurunnya penerimaan pajak daerah ditahun 2020 turut dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)

Kabupaten /Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Lahat	33.722.143.791	37.008.535.966	39.707.051.390	47.330.979.176	16.615.799.511
Kab. Musi Banyuasin	59.484.298.430	58.677.094.555	81.342.647.355	69.943.956.305	39.125.342.030
Kab.Musi Rawas	24.228.776.676	26.940.641.904	27.303.822.001	35.576.484.545	16.125.954.898
Kab. Muara Enim	52.948.650.682	62.718.676.208	69.037.972.075	139.778.756.339	29.393.428.056
Kab. Ogan Komering Ilir	21.849.570.409	37.271.211.375	45.688.054.975	62.971.402.419	20.762.956.928

Kabupaten /Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Ogan Komering Ulu	26.338.589.960	38.559.592.287	43.504.672.972	45.384.989.421	17.168.142.269
Kota Palembang	536.552.681.049	680.012.752.910	721.012.771.615	832.056.845.614	329.658.556.015
Kota Prabumulih	21.849.772.602	24.791.075.219	26.170.664.964	30.189.400.658	12.754.046.556
Kota Pagar Alam	5.761.651.415	7.093.380.548	8.254.708.162	8.438.153.642	15.282.049.927
Kota Lubuk Linggau	22.254.693.729	29.121.881.915	38.458.611.583	41.197.444.298	15.651.209.025
Kab. Banyuasin	56.841.656.913	72.514.691.201	82.349.366.395	127.726.414.584	59.930.281.609
Kab. Ogan Ilir	62.843.668.168	15.769.597.192	19.462.789.192	40.820.380.128	29.004.290.981
Kab. OKU Timur	21.195.826.198	28.519.990.236	30.073.061.388	36.226.054.370	13.114.820.324
Kab. OKU Selatan	8.015.920.952	12.114.840.273	13.021.942.319	17.477.326.224	4.213.084.126
Kab. Empat Lawang	9.772.694.199	10.019.913.220	10.417.052.140	10.910.863.344	2.971.108.855
Kab. PALI	7.109.679.674	12.062.403.805	16.208.269.729	18.734.322.527	4.553.021.897
Kab. Musi Rawas Utara	13.051.756.813	10.032.140.048	9.648.375.423	12.083.618.589	2.911.549.335

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Data diolah, 2021)

Tabel 1.1.1 di atas menunjukkan telah terjadinya penurunan penerimaan pajak daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ditahun 2020. Kondisi ini menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk mencari berbagai solusi yang diharapkan dapat memicu peningkatan pajak daerah. Kondisi pajak daerah yang menurun menyebabkan belanja daerah turut menurun karena, belanja daerah sangat ditentukan oleh penerimaan daerah salah satunya pajak daerah.

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena jika retribusi daerah meningkat maka penerimaan daerah juga meningkat sehingga dapat memicu peningkatan belanja daerah. Retribusi daerah Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan cenderung menurun, hal ini disebabkan karena sistem pemungutan retribusi di Sumatera Selatan yang kurang tepat. Salah satu sistem retribusi yang harus diperbaiki ialah sistem retribusi parkir pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan karena, dilansir dari (Sripoku.com, 2020) “Retribusi parkir kabupaten/kota di Sumatera Selatan tidak mencapai target

karena, beberapa titik parkir dikuasai oleh juru parkir liar yang tidak menyetor hasil retribusi ke pihak dinas perhubungan sehingga target penerimaan retribusi daerah sulit dicapai”. Sistem pemungutan retribusi parkir dapat diperbarui dengan pemberian karcis melalui mesin elektronik agar seluruh data dapat terekam otomatis dan meminimalisir penyelewengan retribusi parkir, sehingga penerimaan retribusi daerah dapat meningkat dan mendorong peningkatan belanja daerah.

Dana Perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat yang mampu meningkatkan penerimaan daerah, sehingga belanja daerah yang sangat ditentukan oleh penerimaan daerah juga dapat meningkat. Jumlah dana perimbangan yang diterima suatu daerah tergantung pada tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja daerahnya. Berdasarkan data (BPK RI, 2020), “Sumatera Selatan berada dikategori “menuju mandiri” dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2016 hingga 2019 adalah 38%, artinya belanja daerah dibiayai sebesar 38% oleh pendapatan asli daerah Sumatera Selatan dan sisanya sebesar 62% masih bergantung pada dana perimbangan”. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebagian besar belanja daerahnya masih bergantung pada dana perimbangan. Ditahun 2020, dana perimbangan diproyeksikan akan menurun menjadi 60%, artinya dana perimbangan hanya akan membiayai 60% belanja daerah padahal dana perimbangan perlu ditingkatkan agar belanja daerah juga dapat meningkat.

Kondisi ketika lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat tentu menyebabkan penerimaan daerah turut meningkat, sehingga akan memberikan pengaruh yang positif yaitu dapat menyebabkan belanja daerah meningkat.

Tabel 1.1.2 Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)

Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Prov. Sumsel	1.530.290.904.243	1.103.221.135.951	100.343.182.502	87.530.039.615	14.532.195.002
Kab. Lahat	480.882.182.253	439.595.883.250	426.638.966.521	525.531.423.994	60.544.341.166
Kab. Musi Banyuasin	143.557.756.416	148.923.958.916	410.016.348.041	551.981.750.123	258.087.235.835
Kab. Musi Rawas	195.848.124.703	238.585.013.959	322.866.487.580	369.036.577.287	73.017.840.383
Kab. Muara Enim	231.575.484.598	426.211.391.918	500.604.785.609	613.235.516.597	138.092.468.202

Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Ogan Komering Ilir	398.250.055.948	403.649.604.300	384.339.172.055	632.461.751.364	221.678.540.624
Kab. Ogan Komering Ulu	165.475.021.535	192.412.873.423	225.316.291.939	351.802.735.434	94.007.549.907
Kota Palembang	477.752.390.888	417.674.505.280	542.012.562.196	938.308.622.842	127.291.823.896
Kota Prabumulih	118.878.509.545	102.039.244.518	129.386.576.549	257.653.057.909	43.914.166.050
Kota Pagar Alam	150.956.576.967	66.364.691.764	59.530.359.531	140.384.851.982	27.238.644.947
Kota Lubuk Linggau	88.116.291.293	75.583.753.060	112.136.901.373	165.065.900.932	42.335.123.880
Kab. Banyuasin	331.991.023.562	442.249.995.138	490.555.181.260	655.369.497.547	267.914.504.347
Kab. Ogan Ilir	193.291.787.377	256.310.828.391	312.032.173.931	382.466.872.107	161.154.096.528
Kab. OKU Timur	269.089.292.861	412.068.151.973	317.262.486.814	550.839.014.638	212.831.271.399
Kab. OKU Selatan	233.810.648.602	261.349.601.020	314.484.782.778	389.678.691.087	6.718.288.163
Kab. Empat Lawang	140.855.601.620	153.823.202.650	201.163.340.108	307.550.463.422	22.543.607.199
Kab. PALI	124.317.066.607	133.416.146.013	129.664.664.479	525.948.188.160	29.386.649.078
Kab. Musi Utara	99.424.729.836	116.046.642.217	157.483.161.184	217.731.548.403	87.722.091.088

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1.2 diketahui bahwa, lain-lain pendapatan daerah yang sah di Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung belum stabil dan menurun ditahun 2020. Penurunan ini turut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus yang menjadi penerimaan tertinggi dibandingkan penerimaan lainnya sejak tahun 2016 hingga 2020. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebenarnya bermanfaat untuk membiayai belanja daerah, namun setiap tahun kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan terus menerima dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah cenderung rendah dan membutuhkan penerimaan tambahan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah akan turut menurun apabila dana penyesuaian dan otonomi khusus selaku pendukung pos lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun karena, pemerintah terpaksa hanya mengandalkan

pendapatan asli daerah yang jumlahnya masih cenderung rendah dan belum cukup untuk membiayai keseluruhan belanja daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran dianggap sebagai tabungan pemerintah yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun-tahun sebelumnya. SiLPA merupakan salah satu komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dananya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Berikut data sisa lebih perhitungan anggaran milik kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tabel 1.1.3 Data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)

Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Prov. Sumsel	35.579.268.822	64.859.465.661	40.929.016.279	686.485.024.491	349.152.583.099
Kab. Lahat	86.469.305.776	2.897.512.618	1.942.278.544	84.114.016.648	342.816.597.734
Kab. Musi Banyuasin	30.399.429.018	29.823.279.857	24.126.960.652	247.489.457.842	591.786.528.942
Kab. Musi Rawas	9.848.993.887	4.939.580.276	47.257.812.030	156.378.406.932	206.354.943.217
Kab. Muara Enim	41.377.049.925	24.044.052.831	125.172.898.761	283.257.160.695	327.465.060.184
Kab. Ogan Komering Ilir	9.036.007.626	8.167.381.569	14.772.638.886	310.713.631.676	412.352.887.226
Kab. Ogan Komering Ulu	60.834.751.746	88.206.454.680	94.775.750.462	88.123.967.363	145.300.371.522
Kota Palembang	92.711.394.789	62.244.691.877	97.731.626.695	71.427.429.232	55.323.649.612
Kota Prabumulih	1.548.326.075	4.797.350.658	28.290.731.443	132.239.775.102	171.866.820.390
Kota Pagar Alam	11.765.924.969	8.897.284.131	6.251.589.967	13.427.159.214	42.056.850.596
Kota Lubuk Linggau	3.808.787.125	2.822.763.957	1.694.369.334	1.323.461.131	832.396.092
Kab. Banyuasin	61.303.417.038	38.366.038.720	73.079.556.830	137.352.351.784	157.434.947.862
Kab. Ogan Ilir	35.812.927.196	23.529.908.937	30.894.273.481	71.845.973.812	125.093.006.230
Kab. OKU Timur	1.461.849.120	3.498.199.865	17.809.066.792	27.514.187.724	19.371.720.046
Kab. OKU Selatan	64.053.318.663	6.975.399.498	25.480.252.893	54.603.961.373	2.614.368.376
Kab. Empat Lawang	955.215.371	11.592.143.133	16.329.045.546	26.831.570.408	22.789.417.778
Kab. PALI	2.429.368.510	3.573.527.278	31.731.316.557	5.467.196.744	25.711.101.886
Kab. Musi Rawas Utara	11.487.933.110	34.540.532.728	54.417.126.597	101.911.055.031	48.167.341.400

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Data diolah, 2021)

Tabel 1.1.3 menunjukkan bahwa jumlah SiLPA Provinsi Sumatera Selatan masih belum stabil dan cenderung meningkat. Keadaan ini juga terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ditahun 2020 secara rata-rata memiliki nilai SiLPA sebesar Rp158.666.941.711. Nilai tersebut tentu meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 karena, rata-rata nilai SiLPA 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 hanya sebesar Rp106.707.103.689. Besarnya SiLPA sebenarnya bermanfaat dalam menutupi defisit APBD dan membiayai program atau kegiatan dalam belanja daerah yang anggarannya tidak tersedia, tetapi SiLPA yang cenderung meningkat turut mengindikasikan besarnya belanja daerah yang gagal direalisasikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh yang diberikan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah ada pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah ada pengaruh antara lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah ada pengaruh antara sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

6. Apakah ada pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar dapat terfokus dalam pembahasan maka akan dibatasi pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh antara lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pengaruh antara sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan bacaan bagi para ilmuan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa lebih perhitungan anggaran dan belanja daerah dalam sektor akuntansi sektor publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan